

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A . Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana.

Dari berbagai literature dapat diketahui bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata srafbaarfeit oleh sarjana-sarjana indonesia antara lain : tindak pidana, delict, perbuatan tindak pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata srafbaarfeit. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah :

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan *ordonantie tijdelijke byzondere strafbepalingen*.

4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat nomor 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya :
 - a. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum.
 - b. Undang-undang nomor 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.¹
 - c. Penetapan presiden nomor 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Pada hakekatnya penulis, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisan ini berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukan maksud yang sama. Namun demikian, sekedar untuk diketahui di bawah ini dikemukakan seputar perdebatan konseptual berkaitan dengan munculnya berbagai istilah itu.

Moeljatno misalnya, mempertanyakan para sarjana yang menyamakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya dengan istilah

¹ Tongat. SH., M. Hum, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM press. 2012, hal. 91-92

strafbaarfeit tanpa ada penjelasan apapun. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai salinan kata strafbaarfeit mengatakan, bahwa untuk melihat apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah strafbaarfeit perlu diketahui apa arti strafbaarfeit itu sendiri. Menurut simons, strafbaarfeit dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut van hammel, strafbaareit adalah kelakuan yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Bertolak dari dua pendapat diatas ,tersimpul, bahwa strafbaarfeit pada dasarnya mengandung pengertian seperti berikut :

- a. Bahwa kata *feit* dalam istilah strafbaarfeit mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Apa yang disebut dalam butir a diatas, menurut Moljatno pengertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah perbuatan pidana. Sebab menurut beliau perbuatan mengandung makna kelakuan+akibat, bukan hanya berarti kelakuan saja. Sementara apa yang disebut dalam butir b, maknanya juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab dalam istilah perbuatan pidana tidak dihubungkan

dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batin antara pembuat/pelaku dengan perbuatannya. Dengan demikian Moeljatno, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Hal ini menurut Moeljatno, berbeda dengan istilah *strafbaarfeit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.

Dalam pandangan Moeljatno, istilah perbuatan pidana sama pengertiannya dengan istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris. Sebab, *criminal act* juga mengandung arti kelakuan+akibat. Selain itu *criminal act* juga dipisahkan dari *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Pandangan Moeljatno merupakan pandangan dualistik tentang perbuatan pidana.

² *Ibid*, hal. 92-93

Dengan pemahaman seperti tersebut diatas, maka menurut Moeljatno, untuk adanya pertanggungjawaban pidana cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.

Pada hemat penulis, penjelasan Moeljatno tentang istilah perbuatan pidana tersebut cukup relevan, tetapi juga bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar penjelasan Moeljatno tentang istilah perbuatan pidana adalah karena beliau memberikan makna terhadap istilah perbuatan sebagai kelakuan+akibat, sementara apa yang dimaksud akibat dalam konteks itu tidak pernah dijelaskan. Padahal, perbuatan pidana tidak bisa menunjuk pada perbuatan/tindak pidana materiil saja yang memang mempersyaratkan timbulnya akibat untuk terjadinya tetapi juga juga dapat menunjuk pada tindak pidana formil. Jenis perbuatan pidana ini dianggap telah terjadi dengan telah dilakukannya rindakan yang dilarang. Dengan demikian pada hemat penulis, istilah perbuatan dalam perbuatan pidana yang diberi makna sebagai kelakuan+akibat oleh Moeljatno, tidak selamanya relevan. Sebab ada perbuatan pidana yang hanya mempersyaratkan kelakuan (yang dilarang) tanpa mempersyaratkan akibat untuk terjadinya, yaitu perbuatan/tindak pidana formil.³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

³ *Ibid*, hal. 93-94

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

*"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."*⁵

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara

⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 62

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁶

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Menurut Moeljatno perbuatan pidana atau tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perbuatan (manusia)
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP.
 - c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif)⁷
2. Jenis-jenis tindak pidana

Penggolongan tindak pidana menurut doktrin

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut :

⁶ Diakses dari <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, pada tanggal 6 april 2019

⁷ Tongat. SH.,M.Hum, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM press. 2012,hal. 96

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

1. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechdeligh*, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan⁸ sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelicgh* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicght*, yaitu perbuatan-perbuatan oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quia prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir

⁸ Tongat. SH., M. Hum, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM press. 2012, hal. 105

mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan, dan sebagainya.⁹

Patut dicatat, bahwa dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti disebut diatas dapat diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana, dengan demikian tidak semua kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sebelum dirumuskan dalam undang-undang. Tetapi sebaliknya, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formal dan tindak pidana materiil.

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/ selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang

⁹ *Ibid*, hal. 106

dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikalifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan sebagainya.

2. Tindak pidana materiil.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, penipuan dalam pasal 378 KUHP dan sebagainya.

- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik commissionis, delik omissionis dan delik comissionis per omissionis comisa.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hal 106

1. Delik comissionis

Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.¹¹

2. Delik omissionis

Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

3. Delik comissionis per omissionis comisa

Delik comissionis per omissionis comisa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹²

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa)

1. Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, dan sebagainya.

¹¹ *Ibid*, hal.108

¹² *Ibid*,hal. 108

2. Tindak pidana kealpaan/ delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaan mengakibatkan matinya orang, delik yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaan mengakibatkan orang lain terluka, dan sebagainya.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda.
1. Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan.
 2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/ delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya terjadi sekali, maka masuk kualifikasi pasal 480 KUHP (penadahan biasa).¹³
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang dan

¹³ *Ibid*, hal.109

berlangsung terus. Dan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus. Contoh tindak pidana ini misalnya tindak pidana yang diatur dalam pasal 333 KUHP yaitu tentang tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang merampas kemerdekaanya itu belum dilepas (masih disekap dalam kamar, misalnya), maka selama itu pula tindak pidana itu masih berlangsung terus.

2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai dengan telah dilakukanya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Contoh tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
 1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi 2 jenis :
 - a. Tindak pidana absolut

Tindak pidana absolut adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutanya. Contohnya

tindak pidana perzinahan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP dan sebagainya, jenis tindak pidana ini menjadi aduan, karena sifat dari tindak pidananya sendiri.

b. Tindak pidana aduan relatif.

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Contoh tindak pidana ini misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP dan sebagainya.

2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutanya. Misalnya tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian tindak pidana penggelapan dan sebagainya.

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Sebagai contoh dapat dikemukakan :

Tindak pidana dalam pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedang tindak pidana dalam pasal 363 dan 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi/emberat dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (362 KUHP).

Tindak pidana dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedang tindak pidana dalam pasal 374 dan 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi/pemberatan dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (372 KUHP).¹⁴

3. Unsur-unsur tindak pidana
 - a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Dibawah ini di sajikan beberapa

¹⁴ *Ibid*, hal.111

batasan/pengertian tindak pidana dari para sarjana yang menganut pandangan monistis.

1. D.simons

Menurut simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.¹⁵

Menurut simons adanya tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif maupun perbuatan negatif.
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dengan penjelasan seperti diatas maka tersimpul bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang yang melakukan pembunuhan eks pasal

¹⁵ Tongat. SH.,M.Hum, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM press. 2012, hal. 95

338 KUHP, tetapi kemudian ternyata orang yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya oleh karena orang gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana.¹⁶

Menurut P. A. F. Lamintang terdapat dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsurnya :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri, di dalam jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau tidak sengaja

¹⁶ *Ibid*, Hal. 95

2. Maksud atau voornemen pada percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan dan lain sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

B. Tindak pidana pembunuhan

1. pengertian pembunuhan

Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan nyawa.

Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah

suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan biasa

Pada KUHP tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Pasal 338 KUHP menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan pada Pasal 340 KUHP menyatakan :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Unsur-unsur pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif

Perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif

perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum,

karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, sedangkan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

4. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh/ nyata. Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Pembunuhan tidak sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat.

Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana terhadap "nyawa" dalam KUHP dimuat dalam Buku II Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" yang terdiri dari tiga belas pasal, dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam pasal 350 KUHP.

Berdasarkan pengelompokkan, bahwa tindak pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur "kesengajaan" maupun karena unsur "ketidaksengajaan".

Apabila kelompok tindak pidana pembunuhan di atas diurutkan sesuai dengan sistematika dalam KUHP, maka urutannya adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP
2. Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam pasal 339 KUHP
3. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP
4. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP
5. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam pasal 344 KUHP
6. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, diatur dalam pasal 345 KUHP¹⁷

C. Tinjauan pustaka tentang gangguan kejiwaan

1. Definisi gangguan kejiwaan

Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, gaangguan tersebut mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan juga masyarakat.

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

¹⁷Diakses dari <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-pembunuhan.html> pada tanggal 13 april 2019.

Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹⁸

Dalam pasal 22 undang-undang RI tahun 2014 dalam hal ODGJ menunjukan pikiran dan atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya, maka tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat psikofamarka terhadap ODGJ sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya.

2. Faktor penyebab gangguan kejiwaan

Hingga sekarang belum ditemukan penyebab (etiologi) yang pasti mengapa seseorang menderita skizofrenia, padahal orang lain tidak. Ternyata dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukan faktor tunggal. Penyebab skizofrenia menurut penelitian mutakhir antara lain:

- a. Faktor genetik
- b. Virus
- c. Auto antibody
- d. Malnutrisi

¹⁸ Undang-undang RI nomor 18 tahun 2014

Adapun beberapa faktor lain penyebab gangguan kejiwaan antara lain yaitu:

a. Faktor somatik

Faktor somatik yaitu akibat gangguan pada neuroanatomi neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik serta faktor pranatal dan perinatal.

b. Faktor psikologik

Faktor psikologik yaitu keterkaitan interaksi ibu dan anak, peranan ayah, persaingan antara saudara kandung hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelegensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan tersebut kurang baik, maka dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu, dan rasa bersalah yang berlebihan.

c. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh mengenai keagamaan.¹⁹

¹⁹ Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/41478/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 13 april 2019

3. Teori-teori psikologis menurut para ahli

a. Teori Psikoanalisis Depresi

Freud menuliskan dalam karyanya 'Mourning and Melancholia' sebuah teori bahwa potensi depresi mulai diciptakan pada awal masa kanak – kanak. Hal ini terjadi ketika dalam periode oral, ada kebutuhan anak yang kurang terpenuhi atau justru dipenuhi secara berlebihan sehingga menyebabkan seseorang terlalu bergantung pada orang lain. Freud juga mengemukakan bahwa ketika kehilangan seseorang yang dicintai, maka kemarahan terpendam akan kehilangan tersebut bisa menjadi depresi yang menyerang diri sendiri.

b. Teori Kognitif Depresi Beck

Aaron Beck mengemukakan teori psikologis tentang gangguan mood kontemporer terpenting yang menganggap proses berpikir sebagai faktor penyebab terjadinya depresi atau gangguan mood. Orang – orang yang depresi mengalaminya karena pemikiran mereka menyimpang dalam bentuk interpretasi yang negatif. Beberapa penyimpangan kognitif utama pada individu yang mengalami depresi menurut Beck adalah:

1. Membuat kesimpulan yang subjektif
2. Abstraksi selektif
3. Seringkali melakukan overgeneralisasi terhadap semua masalah
4. Melakukan magnifikasi dan minimisasi

c. Teori Ketidakberdayaan

Teori psikologis tentang gangguan mood ini yaitu suatu situasi dimana individu yang sedang mengalami kegagalan, maka ia akan menganggap kegagalan tersebut berasal dari ketidak berdayaannya untuk melakukan beberapa hal dan menjelaskan beberapa penyebabnya. Beberapa macam teori ini adalah:

Teori Atribusi dan Learned Helplessness – Teori ini berpendapat bahwa depresi berkembang dan berhubungan dengan pandangan pesimis yang dimiliki oleh individu tentang masa depannya sendiri. Individu akan mencoba mengatribusikan penyebab kegagalannya.

Teori Learned Helplessness – Individu yang pasif dikuasai oleh perasaan tidak berdaya dan tidak dapat mengontrol hidupnya karena trauma pada pengalaman buruk.

d. Teori Hopelessness

Perasaan bahwa hasil yang diharapkan tidak akan pernah muncul dan individu tersebut tidak bisa merubah situasi yang ada. Kemungkinan perasaan ini muncul akibat rendahnya self esteem dan cenderung menganggap bahwa kejadian yang negatif akan mengakibatkan sejumlah hasil yang negatif juga.

e. Teori Keputusan

Teori psikologis tentang gangguan mood ini menganggap bahwa depresi disebabkan karena keputusan, karena mempunyai perkiraan

bahwa hasil yang diharapkan tidak akan terjadi, atau akan terjadi hal yang tidak diinginkan serta tidak dapat diubah.

f. Teori Interpersonal Depresi

1. Orang yang mengalami depresi menganggap bahwa orang lain kurang memberikan dukungan kepada mereka sehingga kurang dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi peristiwa kehidupan yang negatif.
2. Individu yang depresi cenderung terbatas pada jaringan dan dukungan sehingga mengurangi kemampuan sosialnya.
3. Individu depresi mempunyai konsep diri yang negatif dan hanya memiliki sedikit keyakinan mengenai kepedulian orang lain.
4. Depresi pada remaja bisa ditimbulkan oleh kemampuan pemecahan masalah individu yang rendah.

g. Teori Biologis

Teori psikologis tentang gangguan mood ini menyatakan bahwa pada tingkat yang lebih sederhana, gangguan mood bisa menyebabkan perubahan fisik seperti gangguan selera makan dan juga perubahan pola tidur. Terjadinya akibat yang lebih kompleks merupakan pengaruh yang dihasilkan proses biologis pada rasa depresi dan kesenangan. Faktor yang termasuk ke dalam teori biologis adalah faktor genetik.

Penelitian mengenai genetik memberikan bukti yang kuat mengenai kontribusi aspek biologis terhadap gangguan mood. Adanya

observasi yang menyatakan bahwa gangguan mood diturunkan dalam keluarga dapat dipastikan kebenarannya. Apabila seseorang memiliki keluarga yang mengalami gangguan depresi mayor akan dua kali beresiko mengalami depresi daripada orang lain.

h. Teori Humanistik Tentang Depresi

Dalam teori humanistik, orang yang depresi terjadi karena mereka tidak dapat memberi makna pada keberadaan mereka dan membuat pilihan – pilihan yang menghasilkan self fulfillment atau pemuasan diri sendiri. Karena itu mereka menganggap bahwa dunia adalah tempat yang menjemukan. Menurut Nevid dan kawan – kawan, depresi sering terjadi sebagai konsekuensi yang ada sebagai hasil dari mendasarkan self esteem pada pekerjaan atau kesuksesan.

i. Teori Behavioristik Mengenai Depresi

Perspektif teori ini lebih kepada faktor – faktor situasional seperti kehilangan perasaan penguatan yang positif. Perubahan pada frekuensi atau efektivitas dari penguatan dapat mengubah keseimbangan yang ada sehingga merasa hidup menjadi tidak berharga. Orang akan merasa tidak termotivasi dan depresif ketika penguatan positif berkurang dan menyebabkan ketidak aktifan dalam kesehariannya.²⁰

²⁰ Diakses dari <https://dosenpsikologi.com/teori-psikologis-tentang-gangguan-mood-pada-manusia> pada tanggal 13 april 2019